

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT  
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA  
(Studi kasus di PT. Mandiri Tunas Finance)**



**ABSTRAKSI SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**

**APRIYA RUKMALA SARI**

**C 100 990 177**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2011**

## **ABSTRAKSI SKRIPSI**

Judul : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN  
FIDUSIA (Studi kasus di PT. Mandiri Tunas Finance)

Nama Lengkap : APRIYA RUKMALA SARI

N I M : C 100 990 177

N I R M : 99.6.106.01000.50177

JABATAN : MAHASISWA

FAKULTAS : HUKUM

JURUSAN : ILMU HUKUM

P.T.S : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Surakarta, \_\_\_\_\_ 2011

Pembimbing I :

Pembimbing II :

( SEPTARINA BUDIWATI, SH., CN., M.H. )

( M. SANDJAJA, S.H., M.H.. )

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

( MUCHAMAD IKSAN, SH., M.H. )

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan saat ini semakin tinggi, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang mana lembaga tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Selain bank, dewasa ini banyak tumbuh berkembang lembaga pembiayaan atau yang sering dikenal dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen, sebenarnya keberadaan lembaga pembiayaan konsumen yang semakin meningkat salah satunya dikarenakan bank yang ada di rasa tidak cukup menanggulangi berbagai kebutuhan dana bagi masyarakat. Penyebab lain adalah “keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank dan keterbatasan dana”.

Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada nasabah dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*supplier*). Antara perusahaan pembiayaan dan konsumen harus ada lebih dahulu perjanjian pembiayaan yang sifatnya pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut.

Berkaitan dengan cara penjaminan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di atas, tidak lepas dari kemungkinan terjadinya suatu resiko, misalnya konsumen wanprestasi, lalu *bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang mana diketahui obyek jaminan fidusia berada dalam penguasaan pemberi fidusia?*.

Selanjutnya terhadap barang jaminan yang didalam perjanjian kredit debitur melakukan wanprestasi, maka eksekusi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan *titel eksekutorial* yang melekat pada jaminan tersebut, sehingga kreditur berdasarkan hal tersebut, atas kekuasaannya berhak menarik kendaraan bermotor tersebut dan menjualnya guna pelunasan hutang debitur.

Eksekusi yang dilakukan pihak lembaga pembiayaan tidak harus dimintakan suatu putusan pengadilan, akan tetapi lembaga pembiayaan selaku kreditur memiliki hak secara hukum untuk melakukan eksekusi secara langsung apabila konsumen melakukan wanprestasi.

Dari gambaran di atas, penulis sangat tertarik untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang mana diketahui obyek bendanya tidak secara langsung dikuasai oleh lembaga pembiayaan?, yang penulis konstruksikan sebagai judul penelitian skripsi, yaitu : **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA** (Studi kasus di PT. Mandiri Tunas Finance).

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

Di dalam penelitian ini penulis memberikan batasan terhadap lokasi penelitian yang bertempat di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Surakarta. Untuk selanjutnya dalam penulisan skripsi ini tidak dicantumkan keterangan lokasi dan/atau cabang atas permintaan pihak PT. Mandiri Tunas Finance dan guna memudahkan penulis untuk memperoleh ijin, data dan keterangan.

## **C. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance ?
2. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance ?
3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance ?

## **D. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia dan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit tersebut di PT. Mandiri Tunas Finance beserta hambatan-hambatan dan cara mengatasinya.
2. Memberikan sumbangan, masukan, dan informasi kepada masyarakat sehingga mereka mengetahui tentang bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia dan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit tersebut di PT. Mandiri Tunas Finance beserta hambatan-hambatan dan cara mengatasinya.

#### **F. METODE PENELITIAN**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah *deskriptif kualitatif*, yang dimaksudkan adalah untuk menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia dan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit tersebut di PT. Mandiri Tunas Finance.

##### **2. Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Sosiologis*, dalam perspektif yuridis bermaksud menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum dan aspek-aspek hukum tentang bentuk dan isi perjanjian

kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia dan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia, kemudian dalam perspektif empiris dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaannya di PT. Mandiri Tunas Finance Surakarta beserta hambatan-hambatan dan cara mengatasinya.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dilokasi penelitian.

#### b. Data Sekunder

Yaitu yang berupa dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

#### a. Penelitian Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara :

##### 1) Observasi (pengamatan)

Yaitu pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.

##### 2) Interview (wawancara)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden yaitu pihak-pihak yang terkait dalam cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.

#### b. Studi Kepustakaan

Yaitu untuk mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi pustaka yaitu membaca, mengkaji, dan menelaah literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bentuk dan isi

perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia dan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia.

c. **Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini dilakukan secara kualitatif yaitu teknik analisis data yang bertujuan mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi kepustakaan yaitu peraturan-peraturan tentang bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia dan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia, kemudian dipadukan dengan pendapat responden di lapangan yaitu tentang cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance dan dari hasil analisis tersebut disimpulkan secara deduktif dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN**

#### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian di dalam Buku III KUHPdata Pasal 1313 yang mengatur bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “.

Dengan kata lain, definisi perjanjian merupakan perbuatan hukum yang bersegi dua atau jamak, dengan demikian diperlukan adanya kata sepakat antara pihak-pihak, dimana pihak yang satu setuju dan yang lainnya untuk melakukan sesuatu.

Perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata merupakan perjanjian *obligatoir* yaitu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, sehingga tidak berlaku bagi perjanjian jenis lain, misalnya : perjanjian perkawinan dan perjanjian kebendaan.

## **2. Syarat sahnya Perjanjian**

Syarat sahnya perjanjian terdapat didalam isi Pasal 1320 KUH Perdata, harus memenuhi empat syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yakni adanya kata sepakat dari para pihak tentang hal-hal pokok yang diperjanjikan, apa yang dikehendaki oleh para pihak yang satu juga dikehendaki oleh para pihak yang lain dan kebalikannya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, oleh hukum di isyaratkan adanya unsur kecakapan sesuai dengan Pasal 1329 KUH Perdata bahwa, “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.
- c. Suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan (hak dan kewajiban) kedua belah pihak.
- d. Suatu sebab yang halal, dalam hal ini adalah mengenai isi perjanjian yang akan dibuat tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan..

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat *subyektif* karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat *obyektif* karena mengenai obyek dari perjanjian.

Keempat syarat perjanjian tersebut di atas merupakan syarat sahnya perjanjian, maka syarat-syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak yang akan membuat perjanjian.

## **3. Obyek dan Subyek dalam Perjanjian**

Pengertian dari obyek dan subyek dalam perjanjian adalah :

- a. Obyek perjanjiannya adalah benda atau uang yang tertuang dalam akta perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak sebagai bentuk persetujuan antara kedua belah pihak sebagai suatu hubungan hukum.
- b. Sedangkan mengenai subyek dalam perjanjian adalah kedua belah pihak yang mana keduanya membawa hak dan kewajiban artinya subyek hukum itu mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam perbuatan hukum yang dilakukan.



#### **4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya**

Menurut R. Subekti, ada 4 bentuk Wanprestasi, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melakukan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak-pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang atau debitur diancam dengan hukuman sanksi yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau debitur atau dinamakan dengan ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan resiko.

### **B. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT**

#### **1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Kredit Bank**

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*) atau dalam bahasa latin “*Creditum*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Pengertian lain diantaranya :

- a. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan pada suatu jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- b. Pengertian tentang kredit dalam Bab I Pasal 1 (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merumuskan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Gatot Wardoyo dalam Hasanudin Rahman, tulisannya yang berjudul “*Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank*”, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya :

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam melepas kreditnya, yaitu :

- a. Akta/Perjanjian Kredit Dibawah Tangan yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris.
- b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris (notariil) atau akta otentik, yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Perjanjian kredit pada umumnya terdiri dari 4 (empat) bagian :

- a. Judul.  
Dalam praktek, judul yang dipergunakan oleh setiap hal berlainan, misal Perjanjian Kredit.
- b. Komparasi  
Komparasi adalah bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum.
- c. Isi  
Isi merupakan bagian dari perjanjian kredit yang didalamnya dimuat hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak.
- d. Penutup  
Merupakan bagian dimuatnya domisili hukum para pihak, tanggal perjanjian ditandatangani, dan tanggal mulai berlakunya perjanjian.

## **2. Isi dan Bentuk Perjanjian Kredit**

Isi merupakan bagian dari perjanjian kredit yang didalamnya dimuat hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak. Pada prakteknya, isi perjanjian kredit harus memenuhi 6 (enam) syarat minimal yaitu :

- a. Jumlah hutang;
- b. Besarnya bunga;
- c. Waktu pelunasan;
- d. Cara-cara pembayaran;
- e. Klausula yang diperjanjikan;
- f. Barang jaminan.

Perjanjian kredit bank umumnya mempergunakan bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan istilah yang dipakai untuk menunjuk pada apa yang dikenal sebagai *standard contract* atau *standart voorwaarden* dalam bahasa Belanda. Badrulzaman menerjemahkan dengan istilah perjanjian baku, dimana baku berarti patokan, ukuran, acuan.

Mengenai definisi perjanjian baku, Droglever Fortuijin (dalam Badrulzaman), merumuskannya sebagai “Perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian”. Sementara itu Hondius (dalam Badrulzaman), memberikan definisi perjanjian baku sebagai “konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu”.

## **3. Jaminan dalam Perjanjian Kredit**

Pada prinsipnya setiap pemberian kredit harus dengan jaminan, baik itu jaminan berupa benda atau jaminan perorangan.

- a. Jaminan berupa benda (Jaminan Kebendaan)

Pemberian jaminan berupa benda berarti mengkhususkan suatu bagian dari kekayaan seseorang dan menyediakannya guna pemenuhan/ pembayaran kewajiban seorang debitur. Kekayaan tadi dapat kepunyaan debitur sendiri dapat pula kekayaan orang lain. Kekayaan dapat beraneka ragam bentuk, baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, serta benda yang tidak berwujud (seperti piutang), antara lain :

- 1) Bentuk jaminan benda tidak bergerak, misal Hak Tanggungan.

- 2) Bentuk jaminan benda bergerak misal Fidusia
- b. Jaminan Perorangan

Pasal jaminan perorangan adalah suatu perjanjian ketiga yang menyanggupi pihak berpiutang (kreditur) bahwa ia menanggung pembayaran suatu utang bila ia berutang tidak menepati kewajibannya. Jaminan jenis ini dapat diadakan tanpa sepengetahuan debitur. Dalam hal ini dapat menjamin pembayaran sepenuhnya atau sejumlah tertentu.

#### **4. Berakhirnya Perjanjian Kredit**

Seperti halnya perjanjian pada umumnya dan karena perjanjian kredit tunduk pada ketentuan hukum perjanjian, maka hapus atau berakhirnya perjanjian kredit dapat diperlakukan Pasal 1381 KUH Perdata yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dari sekian penyebab hapus/berakhirnya perjanjian tersebut dalam Pasal 1381 KUH Perdata lebih banyak disebabkan oleh :

- a. Pembayaran (lunas) yang merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur.
- b. Subrogasi sebagai penggantian hak-hak si berutang oleh pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu (Pasal 1400 KUH Perdata).
- c. Novasi yang merupakan pembaharuan hutang dengan dibuat suatu perjanjian kredit baru sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama.

### **C. TINJAUAN TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN**

#### **1. Lembaga Pembiayaan**

Di Indonesia, walaupun telah ada pranata penyaluran dana yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, secara institusional mulai resmi diakui setelah pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian di tindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang telah di ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017 /2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Yang di maksud dengan Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1

butir (2) Keppres Nomor : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu : “*Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat*”.

Selanjutnya dalam peraturan tersebut di atas ditegaskan secara terperinci mengenai kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
- b. Modal Ventura (*Ventura Capital*)
- c. Perdagangan Surat Berharga (*Securitas Company*)
- d. Anjak Piutang (*Factoring*)
- e. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)
- f. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Selanjutnya pengertian Perusahaan Pembiayaan menurut ketentuan yang di atur dalam Pasal 1 ayat (5) Keppres Nomor : 61 Tahun 1988 juncto Pasal 1 angka (c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

Akan tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, lembaga pembiayaan yang dapat dijalankan oleh suatu perusahaan pembiayaan hanyalah sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit (*credit card*) dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*).

## **2. Bentuk Hukum dan Fungsi Lembaga Pembiayaan**

Mengenai bentuk hukum badan usaha yang di beri wewenang berusaha di bidang lembaga pembiayaan yang meliputi Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan, ditentukan bahwa untuk Perusahaan Pembiayaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut dapat dimiliki oleh :

- a. Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Indonesia.
- b. Badan Usaha Asing dan WNI sebagai Usaha Patungan.
- c. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebesar-besarnya adalah 85% dari modal setor.

Selanjutnya mengenai fungsi dari Lembaga Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Melengkapi jasa-jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dunia usaha yang terus meningkat dan semakin bervariasi.
- b. Mengatasi kebutuhan pembiayaan guna membiayai kegiatan usaha jangka menengah/panjang, yang berskala kecil dan menengah.
- c. Memberikan pola mekanisme pembiayaan yang bervariasi di antara bidang usaha dari lembaga pembiayaan tersebut yang meliputi : sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*ventura capital*), perdagangan surat berharga (*securitas company*), usaha kartu kredit (*credit card*), dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*).
- d. Memberikan beberapa keringanan, seperti persyaratan penyediaan agunan (*collateral*) yang longgar, keringanan di bidang perpajakan, karena keuntungan yang diperoleh bukan obyek pajak penghasilan.
- e. Mengisi celah segmen yang belum di garap oleh industri perbankan.

### **3. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Pada dasarnya pembiayaan konsumen merupakan sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), yang membedakan hanya pihak pemberi kreditnya, di mana pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank yaitu : “Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan cq. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan menegaskan, mengenai

definisi Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Dasar hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Dasar Hukum Substantif

Yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen, adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan azas kebebasan berkontrak, yakni perjanjian antara pihak perusahaan financial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Mengenai azas kebebasan berkontrak di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Pasal ini mengandung arti bahwa para pihak boleh membuat berbagai persetujuan/perjanjian baik yang sudah di atur dalam undang-undang, maupun yang tidak di atur dalam undang-undang, selama apa yang disepakati itu sah, artinya memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

b. Dasar Hukum Administratif

Di samping dasar hukum yang bersifat substantif, ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum administratif bagi keberadaan perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu :

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

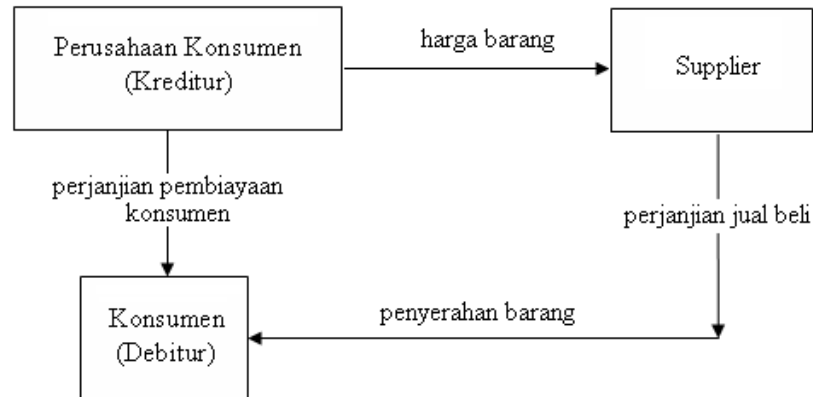
**4. Kedudukan Para Pihak Dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen**

Para pihak dalam transaksi pembiayaan konsumen, adalah:

- a. Pihak perusahaan pembiayaan (kreditur)
- b. Pihak konsumen (debitur)
- c. Pihak Supplier (penjual)

Untuk mengetahui mengenai hubungan para pihak dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, dapat di lihat pada tabel sebagaimana tersebut di bawah ini:

Hubungan para pihak dalam pembiayaan konsumen



Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disampaikan bahwa hubungan hukum yang terjadi yaitu :

- Hubungan hukum pihak kreditur dengan konsumen
- Hubungan hukum pihak konsumen dengan supplier
- Hubungan hukum penyedia dana (pemberi biaya) dengan supplier.

#### 5. Dokumen dan Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Dalam praktek pembiayaan konsumen, terdapat beberapa kelompok dokumen yang sering digunakan, yaitu :

- Dokumen Pendahuluan, yang meliputi *Credit Application Form* (Formulir Aplikasi Kredit), *Surveyor Report* (Laporan Surveyor) dan *Credit Approval Memorandum* (Memo Persetujuan Kredit).
- Dokumen Pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen.
- Dokumen Jaminan, yang meliputi Perjanjian Fidusia, Cessie Asuransi, Kuasa Menjual (dan kuitansi kosong yang ditandatangani oleh konsumen), Pengakuan Hutang, Persetujuan suami/isteri atau Persetujuan Komisaris/RUPS.
- Dokumen Kepemilikan Barang, yang biasanya berupa BPKB, fotocopy STNK dan lain sebagainya.
- Dokumen Pemesanan dan Penyerahan Barang.



f. Supporting Documents

Berisi dokumen-dokumen pendukung lainnya, yang untuk konsumen perorangan misalnya fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, pas foto, daftar gaji, dan sebagainya.

Di samping dokumen-dokumen di atas, dalam transaksi pembiayaan konsumen terdapat tiga macam jaminan, yaitu :

a. Jaminan Utama, berupa kepercayaan dari kreditur kepada debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat di percaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya.

b. Jaminan Pokok, berupa barang yang dibeli dengan dana tersebut. Apabila dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya dan di buat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (fidusia).

c. Jaminan Tambahan

Dalam transaksi pembiayaan konsumen, jaminan tambahan sering juga disertakan, misalnya berupa pengakuan hutang (*Promissory Notes*) atau *Actknowledge of Indebtedness*, kuasa menjual barang, dan *Assignment of Proceed* (Cessie) dari asuransi.

## D. TINJAUAN TENTANG FIDUSIA

### 1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Juga ada istilah *fiduciary eigendom overdraft (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Pengertian fidusia terdapat di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Fidusia yaitu “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan benda tetap berada ditangan pemberi fidusia.

Selain istilah fidusia, ada juga istilah lain yaitu jaminan fidusia yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yaitu, *“hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”*.

Yang menjadi dasar hukum dari fidusia adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dari isi Undang-undang tersebut di atas maka unsur-unsur jaminan fidusia adalah :

- a. adanya hak jaminan
- b. adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.
- c. Benda obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi kuasa.
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

## **2. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, obyek jaminan fidusia ada 2 (dua) :

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Sedangkan yang menjadi subyek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik obyek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

## **3. Pembebanan Jaminan Fidusia**

Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang Pembebanan jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 “sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”

Sedangkan pembebanan jaminan fidusia itu sendiri diatur dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa : “(1) *Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia; (2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah*”.

Sedangkan dalam pasal 6 dan Pasal 9 mengatur tentang pembebanan jaminan fidusia dilakukan sebagai berikut:

- a. Di buat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat : Identitas para pihak; Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; Nilai penjaminan; Nilai benda jaminan fidusia.
- b. Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia adalah : Utang yang telah ada; Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi; Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia; Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

#### **4. Eksekusi Jaminan Fidusia**

Di dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, menyebutkan bahwa ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, maksudnya yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantaraan hakim;

- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan,
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, berdasarkan pada ketentuan pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa perjanjian penjaminan secara Fidusia yang di dalamnya memiliki kekuatan hukum eksekutorial (*titel eksekutorial*) yang mana dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang maksudnya adalah kekuatan eksekutorial adalah eksekusi dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Selanjutnya dalam hal menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Terdapat dalam Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia. Adapun ketentuan pasal 30 tersebut menyebutkan : “*Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia*”.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan dokumen dan data-data yang meliputi :

1. Dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia.
2. Wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.

## **B. Pembahasan**

### **1. Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.**

Bentuk perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance Nomor : 9071100298 tanggal 4 Juni 2011 tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, merupakan perjanjian tertulis yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan. Perjanjian pembiayaan tersebut menggunakan bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan istilah yang dipakai untuk menunjuk pada apa yang dikenal sebagai *standard contract*.

Dengan perjanjian baku para pengusaha diharapkan akan mendapatkan efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. Debitur hanya dapat bersikap menerima atau tidak menerima sama sekali, dimana kemungkinan untuk mengadakan perubahan tidak ada sama sekali. Dengan kata lain, debitur harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang dimuat dalam perjanjian baku tersebut.

Dengan demikian, dari hal-hal yang berkaitan dengan bentuk perjanjian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum perjanjian kredit (pokoknya) tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, tentang asas kebebasan berkontrak, dan perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat-syarat sah nya perjanjian.

Namun disisi lain, perjanjian pembiayaan tersebut dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yang menyatakan bahwa pembebanan (akta) jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta otentik, sedangkan perjanjian pembiayaan di atas, dilakukan dengan akta dibawah tangan (karena dibuat bukan dalam bentuk akta notaris), sehingga

perjanjian tersebut memiliki kelemahan yakni tidak mendapat perlindungan hukum dari Undang-undang Jaminan Fidusia.

Kemudian isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, telah memuat syarat standar sebagai syarat sahnya perjanjian didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai syarat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah sah di muka hukum. Syarat- syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

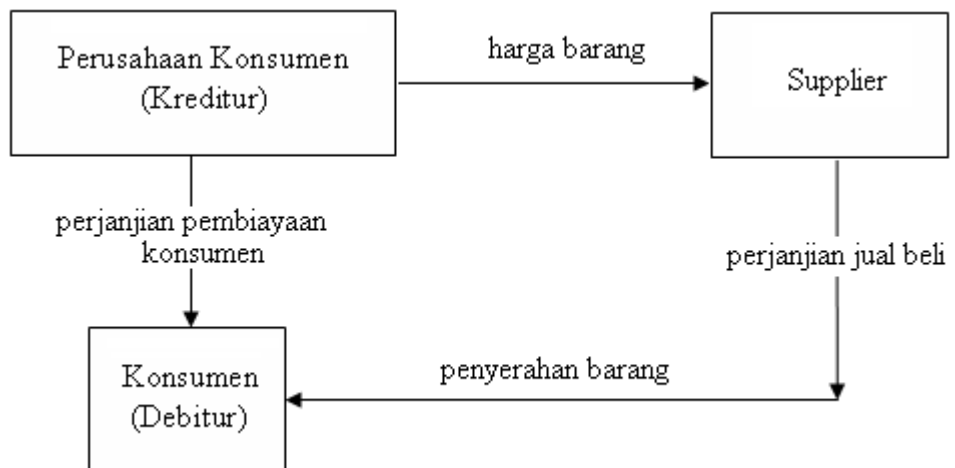
- a. Adanya kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan dirinya, yakni antara :
  - 1) PT. MANDIRI TUNAS FINANCE berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol No. 61, dalam hal ini diwakili oleh LUDY ARDIANSYAH selaku KEPALA CABANG (selanjutnya disebut “PERSEROAN”). Untuk selanjutnya disebut “KREDITUR”.
  - 2) TUAN/NYONYA TUKINEM MULYONO bertempat tinggal di Kalisoro RT. 01 RW. 01 Kalisoro Tawangmangu. Untuk selanjutnya disebut “DEBITUR”.

Selain kedua pihak di atas, masih terdapat 1 (satu) pihak yakni *supplier*, dimana kedudukannya tidak merupakan bagian dari para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Namun secara umum dapat disampaikan, para pihak yang terkait dalam transaksi pembiayaan konsumen, meliputi :

- 1) Pihak perusahaan pembiayaan (kreditur)
- 2) Pihak konsumen (debitur)
- 3) Pihak Supplier (penjual)

Untuk mengetahui mengenai hubungan para pihak dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, dapat di lihat pada tabel sebagaimana tersebut di bawah ini:



Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Hubungan pihak kreditur dengan konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen, adalah hubungan yang bersifat kontraktual, yang artinya didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biaya berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan/angsuran kepada pihak pemberi biaya.

2) Hubungan pihak konsumen dengan supplier

Antara pihak konsumen dengan supplier terdapat hubungan jual beli (bersyarat), pihak supplier menjual barang kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat, bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya.

3) Hubungan penyedia dana dengan *supplier*.

Antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan supplier tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan untuk menyediakan dana dan digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *supplier* dengan konsumen.

- b. Adanya kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu perjanjian.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen dengan pihak PT. Mandiri Tunas Finance mengenai ketentuan kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian dapat diketahui bahwa kedua belah pihak adalah cakap secara hukum.

- c. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi obyek dari perjanjian. Yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan pihak PT. Mandiri Tunas Finance adalah kendaraan bermotor (mobil) yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

- d. Suatu sebab yang halal

Dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan PT. Mandiri Tunas Finance syarat ini telah terpenuhi dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang isinya tidak di larang oleh Undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan kesusilaan.

Perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan merupakan perjanjian berdasarkan azas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian antara PT. Mandiri Tunas Finance sebagai kreditur, dan pihak konsumen sebagai debitur.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Mandiri Tunas Finance merupakan perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia, yang artinya penyerahan hak milik (obyek pembiayaan) dilakukan secara kepercayaan kepada konsumen (customer), hanya saja bukti kepemilikannya dipegang oleh kreditur, yaitu PT. Mandiri Tunas Finance.

Dengan demikian perjanjian pembiayaan konsumen tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa : *“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda”*.



Namun ketentuan lain dalam undang-undang tersebut, yakni Pasal 6 huruf a, dapat menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan yang jaminan secara fidusia yang dibuat dengan akta dibawah tangan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa pembebanan (akta) jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta otentik, sedangkan dalam perjanjian pembiayaan di atas, dilakukan dengan akta dibawah tangan (karena dibuat bukan dalam bentuk akta notaris), sehingga perjanjian tersebut memiliki kelemahan yakni tidak mendapat perlindungan hukum dari Undang-undang Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan PT. Mandiri Tunas Finance, merupakan perjanjian *accessoir* (tambahan), karena timbulnya perjanjian fidusia harus didahului oleh perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang melahirkan utang piutang antara debitur dan kreditur, yang mana utang tersebut kemudian dijaminakan pelunasannya dengan jaminan fidusia tersebut. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan ketentuan bahwa debitur atau pihak lain yang disetujui oleh debitur dan kreditur secara bersama-sama berkewajiban untuk menyerahkan barang-barang tertentu kepada kreditur (sebagai penerima fidusia), untuk menjamin pelunasan seluruh utang debitur tersebut.

## **2. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.**

Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang/tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak/para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekwensi lain yang di atur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Mandiri Tunas Finance wanprestasi yang terjadi diantaranya :

- a. Debitur tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, tidak melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh angsuran;
- b. Debitur tidak memenuhi kewajiban seperti merawat dan menjaga keutuhan barang jaminan dari segala kemungkinan kerusakan, hilang atau musnah, satu dan lain hal atas resiko sendiri;
- c. Debitur melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan seperti menjual, meminjamkan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan dan/atau berakibat beralihnya barang jaminan tersebut kepada pihak lain siapapun adanya, dengan bentuk dan cara apapun juga, tanpa pemberitahuan kepada pihak kreditur.
- d. Barang jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan penyitaan pihak lain siapapun.

Dari wanprestasi yang ditemukan penulis di PT. Mandiri Tunas Finance, Tbk tersebut, menurut Damar Aryo Prasetyo Utomo, selaku Remedial Section Head PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Surakarta, upaya penyelesaian wanprestasi didasarkan pada beberapa keadaan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Keterlambatan pembayaran (Over Due)
  - 1) Konsumen over due (4-15 hari)
  - 2) Customer over due (16-30 hari).
  - 3) Konsumen over due (31- 60 hari).
  - 4) Konsumen over due ( 61 – 90 hari ).
  - 5) Konsumen over due lebih dari 91 hari.
  - 6) Konsumen over due lebih dari 150 hari.
- b. Penarikan Obyek Pembiayaan

Penarikan obyek pembiayaan yang merupakan barang jaminan dilakukan oleh *Remedial Operational* melalui Eksekutor/*Debt Collector*. Dalam melakukan penarikan obyek pembiayaan tersebut maka dokumen-dokumen yang diperlukan di analisa dan di cek kelengkapannya. Adapun dokumen yang perlu disiapkan yaitu : Surat Kuasa, Kartu *Account*

*Receivable* (Kartu A/R), dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK).

Apabila eksekutor gagal dalam melaksanakan tugasnya, dalam arti penarikan obyek pembiayaan gagal dilaksanakan, maka idealnya akan ditempuh jalur hukum, yaitu pengajuan gugatan perdata ataupun pelaporan tindak pidana.

c. Pengajuan Gugatan Perdata ataupun Pelaporan Tindak Pidana

Dalam mengajukan gugatan ataupun pelaporan tindak pidana maka kelengkapan data yang diperlukan, meliputi :

- 1) Kronologis Permasalahan dan Tindakan yang diperlukan.
- 2) Copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia.
- 3) Kartu Account Receivable (Kartu A/R)
- 4) Somasi / Surat Peringatan.

Beberapa aspek yuridis yang harus diperhatikan dalam mengkaji terjadinya suatu tindak pidana yang terkait dengan perjanjian pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di PT. Mandiri Tunas Finance, yaitu :

- 1) Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP).
- 2) Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP)

**3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.**

a. Obyek jaminan telah dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. Mandiri Tunas Finance.

Alasan konsumen melakukan pengalihan hak kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan perusahaan ini disebabkan karena konsumen membutuhkan dana secara cepat karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga konsumen terpaksa melakukan pengalihan hak tanpa sepengetahuan perusahaan, sedangkan konsumen merentalkan kendaraan motornya disebabkan konsumen ingin memiliki tambahan uang karena gajinya tidak mencukupi kebutuhan keluarga.

b. Obyek jaminan hilang atau musnah.

Alasan konsumen terhadap kendaraan bermotor yang hilang ini bukan kesalahan yang disengaja oleh konsumen karena kendaraan bermotornya hilang pada saat tidak terduga dan telah memperhatikan pengamanannya.

Apabila terjadi salah satu dari peristiwa diatas, maka pihak konsumen harus melaporkan kejadian tersebut paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak saat kejadian kepada PT. Mandiri Tunas Finance.

Konsumen harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Laporan kehilangan dari kantor polisi setempat
- 2) Fotocopi KTP dan SIM C tertanggung
- 3) STNK asli dan kunci kontak kendaraan
- 4) Formulir klaim
- 5) Surat kuasa pengurusan pemblokiran STNK dan BPKB kepada perusahaan asuransi.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul dan penyelesaiannya, maka pihak PT. Mandiri Tunas Finance mengambil langkah-langkah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dan menjadi dasar yang mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Deddi Anggadiredja, *Lembaga Pembiayaan di Indonesia, Pengembangan Perbankan*, November-Desember 1993.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, .2000. *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hasanuddin Rahman. 1995. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Karnedi Djairan, *Lembaga Pembiayaan Dan Perannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha, Pengembangan Perbankan*, November-Desember 1993.
- Lexy J. Moleong. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mariam Darus Badruzaman. 1993. *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuadi. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- , 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum diakhir Abad 20*, Bandung : Alumni.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1995.
- R. Setiono, *Hukum Perdata II*, Surakarta : BPK UNS, 1986.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Jakarta : Alfabeta, 2003.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Thomas Suyatno. 1983. *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia.

Peraturan Perundang-undangan :

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);*

*Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia;*

*Keppres No : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;*